



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2022-09-07 PKL. 16.00 WIB RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN BNN RI

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
BADAN NASIONAL NARKOTIKA RI**

Tahun Sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 7 September 2022
Waktu : 16.00 s.d 18.00 WIB
Ketua Rapat : Pangeran Khairul Saleh/F-PAN/Wakil Ketua
Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat : Novianti/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi III
DPR RI
Acara : Pembahasan RKA-K/L dan Usulan Program yang
didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari
Komisi III DPR RI

HADIR:

A. PIMPINAN : 4 DARI 5 PIMPINAN

1. Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.
2. Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.
3. H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.
4. Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.

FRAKSI PDI PERJUANGAN (FPDIP) : 11 DARI 11 ANGGOTA

1. ICHSAN SOELISTIO
2. TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.
3. DRS. M,NURDIN, M.M.
4. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., L.L.M.
5. DEDE INDRA PERMANA, S,H.
6. H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S,H., M.H.
7. JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO
8. I WAYAN SUDIRTA, S,H.
9. H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom.
10. NOVRI OMPUSUNGGU, S,H., M.H.

11. IRJEN. POL. (PURN) DRS. H. SAFARUDDIN

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (FPG) : 6 DARI 7 ANGGOTA

1. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.
2. Ir. HJ. SARI YULIATI, M.T.
3. DRS. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.
4. H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E.
5. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.
6. SUPRIANSA, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (FGERINDRA) : 5 DARI 7 ANGGOTA

1. Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.
2. ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.H.
3. SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.
4. BIMANTORO WIYONO, S.H.
5. DRS. H. SYAIFUL RASYID, M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (FNASDEM) : 3 DARI 5 ANGGOTA

1. EVA YULIANA, M.Si.
2. Y. JACKY ULI.
3. ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB) : 3 DARI 5 ANGGOTA

1. H. MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.
2. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.
3. HERU WIDODO, S.Psi.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (FPD) : 3 DARI 5 ANGGOTA

1. Dr. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M.
3. Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) : 2 DARI 4 ANGGOTA

1. HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.
2. H. M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (FPAN) : 2 DARI 3 ANGGOTA

1. H. NAZARUDDIN DEK GAM
2. MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (FPPP) : 1 DARI 1 ANGGOTA

1. Dr. H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.

B. UNDANGAN : Dr. PETRUS R. GOLOSE (KEPALA BNN RI)

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual;

Yang saya hormati Kepala BNN Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran.

Alhamdulillah wasyukurillah kita disehatkan Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, dan pada hari ini kita dipertemukan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan BNN RI dalam rangka fungsi anggaran.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi III DPR RI, berdasarkan daftar hadir secara fisik dan virtual, telah hadir 24 dari 53 Anggota Komisi III DPR RI, yang terdiri atas 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR, dengan demikian kuorum telah terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETOK PALU 1X)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, serta Kepala BNN beserta jajaran, atas kesediaannya memenuhi undangan kami, kami menyampaikan agenda rapat pada hari ini, pertama, penjelasan Kepala BNN terkait dengan RKA-K/L tahun anggaran 2023, diskusi tanya jawab, kesimpulan dan terakhir penutup.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita bisa kita akhiri maksimal pukul 18.00, setuju Pak? Maksimal, siap. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus.

(KETOK PALU 1X)

Hadirin yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Pagu Indikatif tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebesar 1 triliun koma 5 lebih.
- b. Usulan tambahan untuk tahun 2023 sebesar 1 koma 8 triliun lebih. Nota Keuangan tahun 2023 sebesar 1 koma 8 triliun lebih.
- c. Dari RKA-K/L tahun 2023 ini Komisi III ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Kepala BNN Republik Indonesia, apakah ada usulan perubahan program.

Untuk itu kami persilakan Kepala BNN untuk memberikan penjelasan, silakan Pak.

KEPALA BNN (Komjen Pol. Dr. PETRUS REINHARD GOLOSE):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI, dan hadirin sekalian.

Selamat sore.

Salam sehat tanpa narkoba.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas perkenanNya kita masih diberikan nikmat dan kesehatan, sehingga dapat hadir pada rapat kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2022-2023.

Dasar rapat kerja hari ini adalah Surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam tanggal 25 Agustus 2022, perihal Undangan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat.

Dengan substansi pembahasan terkait pembahasan RKA-K/L tahun anggaran 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus DAK. Mengingat BNN tidak memiliki program yang akan didanai dengan DAK, maka dalam kesempatan ini, saya hanya akan menyampaikan informasi terkait dengan RKA-K/L BNN tahun anggaran 2023, di dalam, di mana di dalamnya saya akan menyampaikan terkait arah kebijakan, postur anggaran, dan kegiatan strategis BNN tahun 2023.

Berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tanggal 27 Juli 2022 tentang Pagu Anggaran Kementerian Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2023, BNN mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 1 triliun 837 miliar 656 juta 988 ribu rupiah.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tema RKP tersebut dan untuk mendukung agenda pembangunan stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik, arah kebijakan BNN tahun 2023 meliputi, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan penataan dan penguatan kelembagaan. Arah kebijakan BNN tersebut diimplementasikan dalam program dan kegiatan dengan pengalokasian anggaran sebagaimana telah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Program dan kegiatan

tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan prioritas peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya hormati, serta hadirin sekalian.

Sebagaimana Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan, pagu anggaran tahun 2023 dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, terdapat peningkatan 36,5 atau naik 2,02%. Apabila kita rinci anggaran tersebut menurut jenis belanja, untuk anggaran belanja pegawai sebesar 564 miliar sekian, atau 31% dari total anggaran BNN tahun 2023, sementara untuk belanja barang sebesar 1 triliun 3 miliar sekian, atau 54%, dan belanja modal sebesar dua ratus enam puluh sembilan miliar sekian atau 15%.

Dilihat dari distribusi anggaran per bidang, anggaran BNN 2023 adalah sebagai berikut. Bidang Pencegahan, sebesar enam puluh tiga miliar sekian. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, enam puluh tiga miliar sekian. Bidang Rehabilitasi, seratus lima puluh delapan miliar sekian. Bidang Pemberantasan, empat ratus tiga puluh sembilan miliar sekian. Bidang Hukum dan Kerjasama, dua belas miliar sekian. Bidang Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dua puluh tujuh miliar sekian. Bidang Kesekretariatan satu triliun sekian, terdiri dari belanja barang empat ratus empat puluh lima miliar sekian, lima ratus empat puluh delapan miliar sekian dan belanja modal sepuluh miliar sekian. Bidang Penelitian dan Data tiga puluh tiga miliar sekian. Bidang Pengawasan tiga belas miliar sekian. Bidang Peningkatan SDM dua puluh dua miliar sekian.

Sementara itu apabila dilihat dari distribusi anggaran Satker Pusat dengan Satker Wilayah, komposisi anggaran BNN tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Alokasi pada kantor pusat sebesar satu triliun sekian atau 59%, sedangkan alokasi pada kantor wilayah sebesar tujuh ratus enam puluh dua miliar sekian atau 41% dari total pagu. Alokasi anggaran pada kantor pusat tersebut mencapai 59%, karena di dalamnya terdapat alokasi anggaran belanja pegawai, untuk seluruh BNN, pengembangan dan pelatihan SDM dan pembangunan sarpras wilayah.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya hormati, serta hadirin sekalian, dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan prioritas peningkatan keamanan ketertiban masyarakat, sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2023, BNN melaksanakan lima belas *output* proyek prioritas nasional, dengan total anggaran sebesar seratus dua puluh empat miliar sekian. Adapun *output* proyek BNN tersebut, meliputi kegiatan penguatan ketahanan keluarga dan individu, khususnya remaja, penanganan kawasan rawan narkoba, pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat atau IBM dalam rangka peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi, pelaksanaan pemusnahan layak, lahan tanaman ganja, operasionalisasi pos interdiksi dan pelaksanaan penyidikan berbasis elektronik terkait tindak pidana narkotika.

Di samping pelaksanaan *output* proyek PN BNN melalui alokasi anggaran pada tahun 2023, juga akan melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut.

Satu, Bidang Pencegahan.

- a. Desa Bersinar, dimaksudkan untuk meningkatkan daya tangkal individu dan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, melalui pembentukan empat ratus empat belas Desa Bersinar, Bersih Narkoba, di mana pada lokasi Desa Bersinar telah dilakukan upaya sinergisitas antara program-program yang mendukung, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi, dan pemberantasan.
- b. Pengembangan *soft skill* di SMP dan SMU sederajat. Pengembangan kecakapan sekolah, agar mampu membentuk karakter antinarkoba pada anak didik, yang mandiri dan *continue*. Dilaksanakan di tiga puluh empat provinsi di wilayah kerja BNNP dengan lokus di Wilayah Program Desa Bersinar.
- c. Pembentukan remaja teman anti narkoba pembentukan, *peer educator* anti narkoba bagi remaja dan komunitasnya, melalui penguatan *assertive finish, save regulation and rising out*, dibentuk di seratus tujuh puluh tiga kabupaten kota wilayah kerja BNNK, mengambil lokus di Wilayah Program Desa Bersinar.
- d. Advokasi ketahanan keluarga. Program ketahanan keluarga anti narkoba bertujuan pada peningkatan daya tangkal keluarga, terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dilaksanakan di tiga puluh empat provinsi, seratus tujuh puluh tiga kabupaten kota wilayah kerja BNNP dan BNNK.

Analisis ukuran dampak pengembangan *soft skill* di SMP dan SMU sederajat. Evaluasi dan *soft skill* di SMP dan SMA sederajat, untuk memperoleh gambaran tingkat signifikansi dampak program pencegahan di lingkungan pendidikan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaannya. Pengukuran menggunakan metode Random Control Trial RCT, dengan membandingkan sekolah yang diperoleh intervensi, program dengan sekolah yang tidak memperoleh intervensi pada provinsi yang sama.

Dua, Pemberdayaan masyarakat.

- a. Advokasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba. Advokasi kebijakan kota dilaksanakan oleh tiga puluh empat BNNP dan seratus tujuh puluh tiga BNN Kabupaten Kota, yang menasar pada empat lingkungan pemerintah, swasta pendidikan, dan masyarakat. BNNP sebagai fasilitator dan BNNK sebagai eksekutor program ini.
- b. program *alternative development* pada kelompok masyarakat di kawasan tanaman terlarang. Kegiatan ini dalam rangka pemulihan pemuliharaan kawasan rawan tanaman terlarang, ganja, melalui Program Grand Design Alternative Development GDAD, dengan lokasi *pilot project* menasar di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Utara. Implementasi GDAD ini merupakan salah satu bentuk sinergisitas lintas sektor sebagaimana diatur di Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020-2024.

Bidang Rehabilitasi.

- a. Pelatihan kompetensi teknis rehabilitasi petugas agen pemulihan. Peningkatan kompetensi teknis kepada seribu seratus dua petugas agen pemulihan pada unit intervensi berbasis masyarakat, agar memiliki kemampuan untuk

- memberikan layanan yang optimal bagi penyalahguna narkoba di lingkungannya, dengan kategori coba pakai dan rekreasional.
- b. Pelatihan petugas rehabilitasi. Petugas rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, maupun komponen masyarakat yang dikelola maupun yang bekerja sama dengan BNN, diharapkan mempunyai keterampilan, untuk memberikan layanan rehabilitasi berupa *screening* dan *assessment* penyalahgunaan narkoba, intervensi singkat, layanan konseling dasar, rujukan dan pendampingan lanjut. Jumlah petugas rehabilitasi yang akan diberikan pelatihan pada tahun 2023 adalah sejumlah delapan ratus dua puluh lima orang.
 - c. Pelaksanaan unit Intervensi Berbasis Masyarakat IBM. Penguatan layanan rehabilitasi di empat ratus empat belas unit IBM adalah dalam rangka meningkatkan akses layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan.
 - d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal SPM Lembaga Rehabilitasi. Upaya meningkatkan mutu layanan rehabilitasi dan dan rawat inap dalam rangka memberikan layanan paripurna sesuai dengan SNI, tentang standar pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, pada dua puluh lembaga pemerintah dan komponen masyarakat, tersebar di sepuluh provinsi Riau, Bengkulu, Bali, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, Papua Barat dan Bangka Belitung.
 - e. Klien rawat inap Balai, Loka BNNP. BNN di samping mempunyai tugas dan fungsi untuk peningkatan kompetensi SDM, rehabilitasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi, juga menyelenggarakan layanan rehabilitasi rawat inap bagi penyalahgunaan narkoba. Layanan rehabilitasi rawat inap dilaksanakan di balai besar, balai loka rehabilitasi, BNNP Bengkulu dan BNNP Sulawesi Utara dengan target layanan pada tahun 2023 sebesar seribu lima ratus sebelas orang.
 - f. Klien rawat jalan di BNNP, BBMK. Layanan rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan di BNNP, BNN Kabupaten Kota, dengan target layanan sebesar tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan orang penyalahguna narkoba.
 - g. Penerima layanan IBM melalui peningkatan keterampilan para agen pemulihan pada intervensi berbasis masyarakat yang diharapkan dapat menjangkau tiga ribu tiga ratus enam orang penyalahguna.

Empat, Bidang Pemberantasan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- a. Penyelidikan dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, pelaksanaan penyidikan, penyelidikan dan dilaksanakan oleh unit pusat maupun wilayah, dengan target tahun 2023 sebanyak seribu dua ratus lima puluh lima berkas perkara.
- b. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang bersumber dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Penyelidikan dalam rangka TPPU ini dimaksudkan untuk mengetahui individu dan aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, serta barang-barang atau peralatan yang dilakukan untuk tindak pidana narkoba yang akan dilanjutkan dalam proses penyidikan sesuai

amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Target penyidikan untuk TPPU pada tahun 2023 adalah tiga puluh berkas perkara.

- c. Operasi pemusnahan titik lokasi lahan tanaman narkotika. Pelaksanaan pemusnahan lahan tanaman ganja direncanakan akan dilaksanakan melalui empat belas operasi. Pelaksanaan pemusnahan lahan ini diawali melalui tahap pemetaan, bekerja sama dengan BIG, BPPT, dan LAPAN untuk mendeteksi via satelit, dan drone pada titik lokasi mana yang memungkinkan disinyalir ada lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya. Selanjutnya dipastikan keakuratan koordinat lokasi lahan ganja yang sudah terdeteksi tersebut, untuk dapat dilakukan pemusnahan bekerjasama dengan TNI, Polri dan instansi terkait.
- d. Implementasi aplikasi elektronik administrasi penyidikan e-Mindik. Pelaksanaan implementasi aplikasi e-Mindik ini untuk mendukung proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel, mempermudah dan memperlancar tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum BNN, dalam proses penanganan perkara, serta akurasi data *update report* terkini pengungkapan kasus narkotika di seluruh Indonesia, jumlah kasus tersangka, barang bukti, dan peta sebaran pengungkapan kasus penangkapan tersangka.
- e. Operasional dan pengadaan peralatan inteligen. Dalam rangka penanganan tindak pidana narkotika di samping memerlukan SDM yang handal, juga perlu didukung dengan peralatan IT, agar pelaksanaan penegakan hukum dapat lebih optimal, melalui pengadaan peralatan inteligen untuk mendukung operasi perburuan, *hunting*, posisi target di samping juga akan dilakukan *upgrade monitoring center*, untuk mendukung operasi inteligen.
- f. Tim Asesmen Terpadu. Pelaksanaan TAT diharapkan dapat mengurangi *overcrowding* di rutan dan lapas yang terlibat perkara narkoba. Pelaksanaan TAT bagi penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh unsur medis, dokter, psikolog klinis dan atau psikiater dan unsur penegak hukum BNN, penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan Bapas. Adapun target pelaksanaan TAT untuk BNN pusat sebesar dua puluh lima orang dan BNNP, BNNK sebanyak seribu sembilan ratus tujuh puluh enam orang.

Lima, Bidang Hukum dan Kerjasama.

Bidang Kerjasama BNN menjalin kerjasama internasional, melalui pertemuan *bilateral meeting*, *regional meeting*, dan *international meeting* untuk mengimplementasikan MOU kerjasama terkait pertukaran informasi pemberantasan narkotika, serta rehabilitasi, pertemuan internasional aparat penegak hukum untuk membahas data inteligen.

Bidang hukum yaitu tersosialisasinya perubahan Undang-Undang Narkotika yang komprehensif dan terpadu, merupakan wujud kebijakan yang menjadi konsepsi atas permasalahan yang dihadapi, dalam pencegahan dan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terdapatnya persamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan dalam implementasi Undang-Undang Narkotika dan terwujudnya efektivitas dalam pelaksanaan Undang-Undang Narkotika.

Enam, Pusat Laboratorium Narkotika.

Pembangunan Gedung Laboratorium Narkotika BNN di daerah Jawa Timur, guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba kewilayahan dan dalam rangka untuk percepatan identifikasi narkotika, dalam proses penyidikan.

Tujuh, Penelitian Data dan Informasi.

Pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba, sebagaimana amanah dalam RPJMN 2020-2024, BNN ditugaskan untuk melaksanakan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, setiap dua tahun sekali. Survei prevalensi yang terakhir dilakukan pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2023 salah satu kegiatan strategis BNN yang akan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi adalah pelaksanaan survei prevalensi. Hasil survei prevalensi akan menggambarkan perkembangan penyalahgunaan narkoba, pola dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Data hasil prevalensi penyalahgunaan narkoba, akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyusunan arah kebijakan P4GN ke depan.

Delapan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN, perlu peningkatan keterampilan dalam bekerja, serta menciptakan perubahan positif yang mampu bekerja secara profesional melalui.

- a. Pelatihan struktural bagi administrator, PKA dan pengawasan, PKP dalam upaya mewujudkan *world class bureaucracy* pada setiap instansi pemerintah yang memiliki kompetensi kepemimpinan, kinerja dan pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya. Pelatihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Pelatihan *raid planning and execution*, dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme personel BNN dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dalam operasi penindakan terhadap tersangka kasus narkotika, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya hormati, serta hadirin sekalian, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya mohon Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, dapat memberikan dukungan kepada BNN RI, sehingga BNN RI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan dapat menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Bidang Penanggulangan Narkotika. Rapat Kerja Komisi III DPR RI di sore hari lokasinya di Jakarta Pusat, Komisi III DPR support anggaran BNN RI untuk *war on drugs* setiap saat. Hutan rimba tepi telaga, sedap dilihat mata berbinar, perangi narkoba bersama Komisi III, untuk mewujudkan Indonesia bersinar.

Sekian dan terima kasih salam Indonesia bersinar, bersih narkoba.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om santi santi santi om

War on drugs, speed up and never let up.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kepala BNN.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Kepala BNN. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada para Anggota Komisi III, untuk menanyakan atau memperdalam terkait anggaran yang BNN yang usulkan.

Kita kiri kanan dulu ya. Kiri dulu, baik.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Wayan fraksi.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Eh.

KETUA RAPAT:

Eh salah dari belakang-belakang Wayan, senior Pak Nurdin maaf, Pak Nurdin, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati, Rekan Mitra Kerja kita BNN dan jajaran yang saya hormati.
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komisi III, khususnya PDI Perjuangan saya kira selalu mendukung anggaran mitra kerja kita yang diajukan. Mohon dalam kaitan dengan laporan, karena hari ini kita rapat anggaran, saya tidak melihat berapa anggaran yang akan berikan kepada masing-masing kegiatan. Di tahun 2021 itu ada di sini, misalnya untuk pendamping penyalahgunaan narkoba yang di tingkat universitas sebanyak dua ratus orang, dengan alokasi anggaran dua koma empat miliar, fasilitas rehabilitasi ... anggaran satu koma. Nah yang di 2023 tidak kelihatan. Jadi kegiatannya ada, sasarannya ada, tapi anggarannya berapa tidak kelihatan.

Nah harusnya untuk kegiatan misalnya ini penyelidikan-penyelidikan seratus dua puluh, seribu dua puluh lima berkas perkara, P21, itu anggarannya berapa, karena kita bahas anggaran sekarang ini, sehingga nanti yang diharapkan tadi, udah diberikan tambahan, sekarang kan pagu indikatifnya satu triliun lima delapan tujuh enam lima lima, dan usulan tambahan 2023 satu triliun delapan tujuh miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu, nah ini untuk apa saja, di sini besarnya ada, belanja

operasional, belanja ini, tapi dalam kegiatan, itu harap diberikan rincian anggarannya, kalau perlu besarnya aja, misalnya seribu sekian-sekian, nanti kalau misalnya kurang, atau apa kita bisa melihat mempertimbangkan kurangnya yang di mana, di PD P4GN, di penindakan.

Itu koreksi saya mohon ditambahkan, mungkin tidak di sini, bisa dijelaskan nanti dalam penjelasan. Jadi tiap-tiap kegiatan membutuhkan anggaran berapa, sehingga nanti dengan anggaran satu koma delapan ini, cukup apa tidak? Nah karena tiap-tiap kegiatan ada anggarannya, kita hari ini membahas anggaran, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik sebelah kanan silakan, Pak Supri Golkar, ada yang di tanyakan, oke Pak Pak Habibuokhman, bentar, bentar dulu kan, tadi kan PDI, Demokrat gimana, Pak Hinchu. Baik.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Makasih pimpinan.

Anggota Komisi III yang saya hormati,
Bapak Kepala BNN, Bapak Petrus yang saya hormati bersama dengan seluruh jajaran yang hadir.

Saya ingin juga memulai dengan apa yang tadi juga disampaikan karena kita bicara anggaran, saya pakai buku yang ini juga yang sudah di, dibagikan datanya.

Dari anggaran yang kita mintakan itu yang muncul, muncul anggaran yang sangat lengkap itu justru di halaman, endak ada halamannya, ini yang Prioritas Nasional tahun 2023, *output* proyek PN kita, jadi yang nasionalnya. Dari 15 item ini, itu ada targetnya, targetnya, kemudian anggarannya paling kanan. Jadi kalau saya hitung-hitung ini dua belas koma empat ya, kalau saya jumlahkan, dijumlahkan semuanya dalam jutaan rupiah. Sedangkan yang mengenai misalnya halaman berikutnya Bidang Pencegahan, Desa Bersinar sekian, ini lembaga, pengembangan *soft skill* sekian, enggak keluar angkanya, atau memang ini semua yang 15 prioritas nasional ini keluar angkanya, inilah anggaran itu.

Nah Pimpinan saya mau itu dulu, supaya keluar angkanya dulu, supaya baru kita bisa lihat, karena kita bicara pada anggaran, tapi kalau lihat programnya ini kita sepakat, misalnya juga Bidang Pemberantasan, ini Pak Petrus Golose, ini kalau yang Bidang Pemberantasan nomor 6, itu target Tim Asesmen Terpadu kita di pusat 25, di wilayah seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, oke. Maksud saya apakah ini sudah cukup, dan semua di seluruh wilayah Indonesia, lalu berapa angka *budget*-nya, nanti dari situ akan kelihatan anggaran kita apakah, pas di situ atau tidak, kami belum membacanya ini, mungkin Pimpinan kalau bisa sebelum diputar ke teman-teman, ini dijawab dulu, atau dijelaskan dulu ini anggarannya gitu mungkin, kita bisa lebih fokus gitu, karena angkanya belum saya lihat, atau saya salah membaca dokumen, memang enggak ada angkanya, saya mohon itu dulu.

KETUA RAPAT:

Oke baik.

F-P DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):

Saya mohon itu dulu Pimpinan, makasih.

KETUA RAPAT:

Sebelum saya lempar ke kawan-kawan mungkin ada penjelasan dari Pak Petrus.

KEPALA BNN:

Terima kasih Pimpinan.

Dalam penjelasan tadi kami sudah sampaikan bahwa, anggarannya udah di *breakdown* Pak, mohon izin, dan sekaligus pertanyaan Pak Nurdin dan Pak Hinca. Di Bidang Pencegahan sebesar enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah, Bidang Pencegahan. Kemudian Bidang Pemberdayaan Masyarakat enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah, Bidang Rehabilitasi seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Petrus kita sudah lihat.

KEPALA BNN:

Iyak.

KETUA RAPAT:

Mungkin sebelah kiri lagi, sebentar Partai Golkar dulu ada yang, entar Golkar dulu.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Adde.

F-P GOLKAR (Hj. ADDE ROSSI KHOERUNNISSA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih. Oke terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Kepala BNN, beserta seluruh jajaran.

Saya pertama ingin mengapresiasi, apa yang tadi sebetulnya telah disampaikan Pak Kepala BNN sebetulnya kalau saya dengar, sepertinya kok sudah lengkap, sudah jelas gitu, tapi sayangnya setelah saya buka kanan kiri dan saya konsultasi juga dengan rekan-rekan saya di kanan dan kiri, kok sepertinya agak kurang jelas Pak, kurang detail dan juga kurang terperinci, seperti halnya anggaran ini kaya loncat-loncat gitu Pak, dari data atau dari bahan yang masuk ke kami ini, memang betul di depan ini ada komposisi per jenis belanja yang memang di sana tahun 2023 itu senilai satu koma delapan tiga tujuh T. Nah cuma pada saat masuk ke dalam Program Prioritas Nasional, saya lihat di sini sudah ada anggarannya juga, nah hanya disayangkan pada saat masuk ke kegiatan strategis di masing-masing bidang, tadi ada Bidang Pencegahan, Bidang Dayamas, saya tidak melihat anggaran yang detail tersampaikan dalam paparan yang kami terima ini.

Jadi ini sebagai bagian revisi, agar ke depan biar kami tahu, misalnya tadi untuk Bidang Rehabilitasi, ini ada seribu seratus dua orang, ini berapa sih anggarannya gitu, kemudian juga misalnya bidang-bidang yang lain termasuk juga misalnya Bidang Hukum dan Kerjasama. Karena kita di ke depan ini undang-undang, revisi Undang-Undang Narkotika ini keniscayaan, insya Allah pasti akan terwujud, oleh karena ini kan harus jelas, siapa yang akan diundang untuk sosialisasi, berapa kali kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan, dan juga berapa biayanya. Ini perlu jelas ya Pak, karena kami juga sebagai Anggota Komisi III, mitra Bapak ini pasti mempunyai kewajiban juga, bersama-sama dengan Pemerintah, dalam hal ini Kepala BNN untuk mensosialisasikan hasil revisi Undang Undang Narkotika ini Pak, kepada ya dapil kami masing-masing.

Oleh karena itu detail program per kegiatan saya rasa ini perlu direvisi bentukannya Pak, hasilnya kepada kami, biar kami juga tadi bisa saling melihat, mana yang harus ditambahkan, mana yang memang perlu dikurangi, atau memang mana yang program-program baru yang memang berkaitan dengan tadi P4GN ini harus ditambahkan di dapil-dapil kami masing-masing. Ini penting Pak, karena untuk mempererat kemitraan antara Komisi III dengan BNN. Mungkin sekian saja, terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bisa dilanjutkan oleh Pak Supriansa, silakan.

F-P GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III,
Kepala BNN, dan jajaran yang saya hormati.

Sudah disinggung oleh Ibu Adde Rossi tadi, kurang lebih seperti itu gambar yang ada pada pandangan saya, namun saya memberikan sedikit secara terperinci lagi, seperti gambaran, ini kan usulan pagu indikatif 2023 satu koma lima delapan tujuh triliun ya Pak ya. Nah kemudian usulan tambahan yang menurut terdaftar di sini yaitu satu koma delapan kosong tujuh triliun, kemudian Nota Keuangan 2023 satu koma delapan tiga tujuh triliun, nah itu gambaran umumnya.

Namun kalau kita mencoba membawa ke program-program ini, yang ada di dalam, saya juga belum menemukan kira-kira pada poin-poin apa yang sangat penting dengan angka-angka sebanyak berapa yang dibutuhkan dan tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk seperti apa, supaya ini bisa ada gambaran buat kami Pak Pimpinan. Olehnya itu seperti dijelaskan di sini, petugas agen atau pendamping pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba yang di tingkatkan kapasitasnya sebanyak dua ratus orang, dengan alokasi anggaran sebesar dua koma empat miliar, ini kan jelas pak ya, ada angka yang disebutkan. Nah kalau dibuat seperti ini, paling belakang itu pendampingan program ketahanan keluarga antinarkoba dengan target seribu empat puluh keluarga, apakah ini membutuhkan anggaran, kalau dibutuhkan kira-kira sebesar berapa, kemudian program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa dengan target empat ratus empat belas desa, seperti desa apa yang menjadi pilihannya BNN, bagaimana karakteristik sebuah desa, yang dijadikan sebagai pilihan itu, kemudian fasilitasi program alternatif *development* pada kelompok masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang, dengan target enam belas kelompok masyarakat. Maksudnya ini apakah hanya di tempat tanaman terlarang itu yang ada ganja, ya disebutkan saja Pak, misalnya seperti itu, supaya gambaran kita, oh ini masuk pada posisi yang menjadi perhatian khusus oleh kawan-kawan yang ada di BNN.

Kemudian advokasi kebijakan kabupaten kota tanggap ancaman narkoba, dengan target empat ratus empat belas lembaga, lembaga apa yang dibutuhkan di situ, lembaga apa yang menjadi perhatian serius oleh BNN dan berapa angka-angkanya yang dibutuhkan, karena kalau kita melihat dari angka satu koma delapan triliun, ya kalau di-*convert* dalam sini program-program, ini jumlah-jumlahnya dan pokok-pokok anggarannya, seperti di mana mau disimpan itu.

Kemudian agen pemulihan dilatih kompetensi teknis rehabilitasi sebanyak tiga ratus orang, siapa ini, kemudian lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar pelayanan minimal dengan target dua puluh lembaga seperti itu. Begitulah kira kira seterusnya ini Pak Kepala BNN, sehingga menurut kami butuh penjelasan dan butuh angka-angkanya penempatannya, kenapa dibutuhkan ini, supaya jelas kami bisa menyetujui, bisa memberikan persetujuan dengan apa yang menjadi anggaran tambahan, yang dibutuhkan oleh BNN, pada prinsipnya kami setelah mendengarkan nanti dan itu jelas, karena begini Pak, Kepala BNN, Bapak ini berniat untuk menyelamatkan generasi bangsa, sangat mulia sekali niatnya dan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, kami memahami betul, bagaimana kerja-kerja kawan-kawan yang ada di BNN, siang jadi malam, malam jadi siang, untuk memburu itu semuanya.

Olehnya itu demi penyelamatan bangsa ini, generasi anak bangsa, maka saya kira BNN sekaligus menjadi lembaga yang diharapkan untuk pemulihan daripada orang-orang yang kira-kira kecanduan dari itu, kira-kira seperti berapa anggarannya, juga bisa disebutkan. Kira-kira gambaran-gambaran ini semuanya Pak Kepala BNN, menjadi pertimbangan bagi kami, untuk tidak meragukan, untuk menyetujui apa yang menjadi usulan tambahan anggaran dari BNN.

Saya kira itu kami data tambahan dari Fraksi Golkar, terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Silakan selanjutnya Ibu Eva Yuliana.

F-P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan Rapat.

Selamat sore.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III, Bapak Kepala BNN dan seluruh jajaran yang hadir.

Saya sebetulnya senada dengan apa yang disampaikan, yang sudah disampaikan dari barisan, mana nih Pak, kiri ya, baik dari samping kanan dan samping kiri saya tadi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN itu sebetulnya, kita tadi menangkap dan, ya saya berterima kasih Pak dengan paparannya. Namun setelah kita melihat dalam paparan tulisan yang ada dalam buku, baik buku maupun kertas yang kita terima ini, alurnya itu enggak jelas Pak soalnya, alurnya belum jelas, sehingga kita loncat-loncatnya ini, ini berapa sih sebetulnya anggaran yang pagunya berapa dan kemudian ditambah berapa dan itu untuk apa saja, itu enggak rinci.

Pada dasarnya Bapak Kepala, saya paham tujuan mulia dan besar dari institusi lembaga BNN ini sangat mulia dan itu harus kita dukung dengan anggaran yang kuat juga untuk menuju pada berhasilnya tujuan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pada dasarnya kita setuju, berapa pun anggaran, atau anggaran apa saja yang dibutuhkan oleh BNN untuk memerangi hal yang menjadi apa Namanya, musuh kita bersama, namun ketika dalam permintaan atau pengusulan anggaran itu jelas, kita pun juga paham, mana-mana yang harus kita dorong begitu.

Nah selanjutnya Pak, ini tadi kan disampaikan juga oleh Pak Ancha beberapa hal itu, saya mungkin juga menanggapi, menambahi, menambahi soal advokasi kebijakan kabupaten kota tanggap ancaman narkoba itu, saya rasa ini baik, tapi kan itu baru dalam asumsi saya, mungkin kita perlu di, perlu tahu Pak, ini *output* yang

diharapkan sebetulnya apa, apakah ini ada advokasi, apakah ini sosialisasi, atau mungkin, mungkin yang lain tidak seperti yang saya bayangkan.

Dan berikutnya adalah kita, saya, saya mendukung Pak untuk penambahan atau penguatan anggaran dalam pencegahan, dan kemudian bagaimana kita pendekatan kepada generasi bangsa, anak yang di sini saya lihat adalah SMP, SMU sederajat, memperoleh pengembangan *soft skill*, nah ini pengembangan *soft skill* itu seperti apa. Nah ini, ini kita perlu dijelaskan, tapi pada prinsipnya sekali lagi, bahwa kita akan dukung, saya dukung apa yang dibutuhkan oleh BNN, namun dukungan ini harus dukungan yang jelas, kira-kira begitu, ketika alurnya yang kita terima ini enggak jelas, ya kita pun bingung bagaimana caranya kita akan mendukung. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anggota Komisi III:

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Lanjut silakan.

F-P GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, SH., MH.):

Ya terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota Komisi III,
Yang kami hormati Pak Kepala BNN, Pak Petrus Golose dan rekan rekan jajaran.

Saya enggak banyak Pak, saya hanya *stressing* soal rehabilitasi. Dari pandangan saya rehabilitasi ini sama pentingnya dengan pencegahan ya, yang di sini banyak sekali *item*-nya di *prior* ini, prioritas nasional ya, jadi kalau rehabilitasi saya, yang saya lihat cuma ada di dua poin, nomor empat, nomor lima ya, kalau agen pemulihan yang dilatih kompetensi teknis rehabilitasi tiga ratus orang, itu tiga koma enam miliar, kalau nggak salah Pak ya, tiga ribu enam ratus juta rupiah, dan Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang memenuhi standar pelayanan minimal, angkanya tiga ribu juta atau tiga miliar, ini porsinya menurut saya terlalu kecil sekali dibanding kompleksitas masalah rehabilitasi ini Pak. Kita ini sudah dalam posisi yang tidak biasa saja ya, jumlah orang yang terpapar sudah demikian besar, tapi rehabilitasi kita kan memang tidak memadai, sehingga terus berulang, berulang, kalau saya ikuti perkara-perkara penangkapan-penangkapan narkoba, itu kebanyakan pengguna berulang Pak, sudah berapa tahun yang lalu tangkap, masuk lagi, itu karena memang rehabilitasinya enggak jalan. Nah dibandingkan dengan, kalau memang apa pencegahan penting, ketika angka orang-orang yang terpapar itu belum sebesar saat ini Pak, gampang, pencegahan edukasi, tapi kan itu soal medik ya, rehabilitasi tuh kan soal medik, soal *treatment* Pak, harus benar-benar dimaksimalkan, mungkin itu saja terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagi dari Gerindra, enggak ada ya, silakan Pak Nasir.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Baik. Terima kasih Ketua, Pak Pangeran Khaerul Saleh, atau yang disingkat dengan PKS.

Bapak Ibu Anggota Komisi III,
Kepala BNN beserta seluruh jajarannya.

Tadi Pak Kepala BNN mengajak kita untuk bersama-sama perang narkoba, dan itu disampaikan melalui pantun, karena itu saya juga ingin membalas pantunnya, pergi ke Asahan mencari kerang, sehingga bermalam di Ai' Kanopan, bagaimana kami diajak perang, jika senjata dan amunisi tidak pernah diberikan. Satu lagi nih, batik sido asih beli di Buaran, dikirim untuk kekasih di Nunukan, terima kasih atas paparan anggaran, tapi sayang belum meyakinkan.

Kepala BNN beserta seluruh jajaran yang saya hormati, mudah-mudahan dua pantun tadi mewakili perasaan saya dalam pemaparan anggaran pada sore hari ini. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya terkait dengan *output* ya, anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2023.

Nah karena itu kan perlu ada satu apa namanya semacam penjelasan ya, sehingga kemudian kita tahu bahwa *output* dari kegiatan ini adalah seperti ini, sehingga kita di lapangan juga bisa mengawasi dengan baik. Tadi misalnya disinggung Desa Bersinar, ada empat ratus empat puluh empat, tapi memang sayangnya anggarannya tidak dicantumkan untuk empat ratus empat puluh, empat ratus empat belas desa ini, lalu apa sih yang kita inginkan dari Desa Bersinar ini.

Kemudian juga saya mengajak Kepala BNN untuk kita terus bisa bersinergi, walaupun saya akui bahwa, selama ini agak tersendat-sendat jalannya, bisa jadi mungkin karena BNN apa, lebih fokus pada perlombaan-perlombaan olahraga pertandingan olahraga dan itu memang saya pikir juga bagian untuk memasyarakatkan ya *war on drugs* ya kepada masyarakat.

Oleh karena itu saya mengimbau ya kepada Kepala BNN dan seluruh jajarannya, mari kita berkolaborasi dalam rangka untuk bertransformasi, ya artinya agar kemudian ada perubahanlah di tengah-tengah masyarakat. Saya pribadi memang tidak begitu diajak untuk bicara soal empat kawasan yang ada di Bireuen, empat kawasan yang ada di Gayo Lues, empat kawasan yang ada di Aceh Utara begitu ya, dan ini memang daerah pemilihan saya, dan juga kampung asal saya. Nah karena itu bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi, bahwa memang masyarakat melihat bahwa kita sama. Sebab begini Pak Petrus, di masyarakat juga kadang tahu ya misalnya Si Fulan Anggota Komisi III, lalu ada kegiatan BNN misalnya di tempat itu, mereka tanya kadang-kadang, Pak Nasir kenapa enggak ikut gitu lho ya, Pak Nasir

apa enggak diundang gitu kan, kira-kira itu kan pertanyaannya ya, ya sebenarnya enggak ada masalah sebenarnya, mau diundang atau tidak diundang enggak ada masalah sebenarnya, cuma masyarakat kadang-kadang bertanya seperti itu ya, mereka pengen juga wakilnya itu melihat apa yang dilakukan oleh BNN bersama mereka, ada sebuah kebahagiaan kalau mereka kemudian bisa dilihat dan kemudian kita bisa memantau, mengingatkan, ketika misalnya anggota ini turun ke dapil ya, mereka bisa bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat itu, mengingatkan dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian, karena Lam Teba ya, yang banyak ganja itu, sampai hari ini juga yang namanya alternatif *development* itu enggak, enggak berjalan Pak ya, jadi keinginan kita untuk mengalihkan mereka dari tanam ganja ketahanan hal-hal yang bermanfaat, di Lam Teba setahu saya dan informasi dari masyarakat di sana juga tidak berjalan seperti yang kita harapkan.

Nah oleh karena itu kan perlu sama-sama kita awasi Pak, sayang Pak kan, Bapak menyampaikan anggaran lalu kita menyetujui anggaran itu, tapi tiba-tiba di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu ketika kita menyetujui anggaran ini, maka kita sama-sama ya, untuk kemudian mengawasi, memastikan bahwa program alternatif *development* ini bisa berjalan dengan, dengan baik,

Barangkali demikian Ketua ya, mudah-mudahan apa namanya, kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan strategis dari BNN, dan terakhir tadi soal sosialisasi perubahan Undang-Undang Narkotika, kan tadi pertanyaannya apakah ini sosialisasi setelah undang undang itu berubah ya, atau memang sosialisasi ini dalam rangka perubahan Undang-Undang Narkotika itu ya, dan tentu saja barangkali kita perlu cari kosakata lain selain sosialisasi ya, jadi karena tidak begitu bisa kita tangkap ini, perubahan yang sedang berlangsung sekarang, ingin kita sosialisasikan, atau setelah undang undang ini berubah, baru kita sosialisasikan.

Itu barangkali yang perlu mendapat tanggapan dari Kepala BNN. Demikian, Ketua terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya Habib Abu Bakar silakan.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Petrus ya dan jajaran utamanya BNN yang saya hormati.

Di sore hari ini dari pagi kita hanya bicara angka angka. Dalam melihat BNN ini Pak, antara harapan dan ketar-ketir. Jadi nampaknya PR di BNN ini harus benar-benar kuat, kalau sampai diisukan BNN terima uang empat ratus lima puluh miliar, misalkan, Polisi terima sembilan ratus miliar, itu kan enggak enak dengarnya. Saya enggak ngerti itu bahasa siapa, tapi muncul di media besar-besaran.

Terus yang kedua, BNN ini adanya dalam rangka mengurangi gerakan peredaran narkoba, jangan sampai Pak, saya mohon maaf, jangan sampai adanya BNN, justru narkoba makin beredar, apalagi mohon maaf Pak, setelah kasus kemarin yang terungkap ya, bagaimana kita mau bicara angka-angka Pak, kalau kondisi seperti ini gitu. Padahal kita pada waktu yang sama, kita sedang membuat Undang-Undang Narkoba pengganti Nomor 35, Undang-Undang 35, kita udah keliling dunia Pak, udah beberapa negara kita datang, dan menarik, ada beberapa negara yang santai saja tidak lebih dari dua puluh lima tahun, seperti Portugal ya, enak aja dia, kalau, kalau saya lihat undang-undang kaya gitu enggak demen gitu, pengin hukum mati saja itu, kalau sudah narkoba itu mestinya. Karena Pak, ternyata kalau kita sekarang ngambil aliran rehab atau tidak, karena penuhnya apa, lapas, di tempat negara lain, ada yang dengan pergantian uang, dengan apa, jumlah tahunnya yang terbatas, dan sebagainya. Di beberapa negara lain juga narkoba begitu *enjoy-enjoy* aja gitu, di jalanan ada, di rumah ada, malah disiapkan gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat Pak, permohonan dari anggaran yang disampaikan oleh, ini tidak besar sebenarnya, sewajarnya kita enggak sulitlah, tetapi namanya kita bagian pengawasan Pak, yang kecil pun kita teliti, nah begitu kira-kira.

Sehingga untuk mendapatkan kesepakatan atau persetujuan, mungkin kita perlu ada pendalaman yang cukup kuat ya, untuk masalah anggaran di BNN. Karena kita tahu situasi, khususnya apalagi daerah saya Kalimantan Selatan Pak, udah termasuk daerah besar lima, eh enam katanya, dulu dua, sekarang enam, berarti udah ada peningkatan, tapi ini peredaran jalan terus.

Selanjutnya dari segi *output* prioritas dari BNN Pak, salah satunya ada fasilitas pelayanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi standar pelayanan minimal, SPM ya, sebanyak sepuluh fasilitas, dengan alokasi anggaran sebesar satu koma enam lima miliar. Dengan adanya fasilitas rehabilitasi seperti ini Pak, yang diadakan ya, sejauh mana BNN berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, penempatan para pelaku pengedar narkoba antara di lapas atau tempat rehabilitasi. Situasinya Pak, kalau Bapak lihat tempat lapas dirata-rata yang narkoba, udah baunya enggak enak, udah orang kaya begitu, anggarannya setahun tuh antara lapas dengan Bapak ini kan, lapas ujungnya, sementara Bapak kasus-kasusnya, nah ini satu hal yang sangat tidak, kadang-kadang tidak berbanding lurus ya. Nah bagaimana dengan angka ini Pak, memfasilitasinya.

Yang kedua, apakah dalam program rehabilitasi, hanya orang yang sanggup membayar saja yang dapat ditampung di tempat rehabilitasi tersebut Pak, bagaimana datanya, jika seperti itu, tentu anggaran yang diuangkan tidak tepat sasaran, dan tetap saja lapas menjadi *overcrowding* ya, fasilitas yang tersedia digunakan dengan maksimal. Saya berharap penambahan tempat edukasi yang memadai terus dilakukan Pak ya, karena saya pikir rehabilitasi ini jangan jadi transaksi juga, ngeri ngeri sedap Pak, mungkin di atas nggak tau ..., di lapangan Pak, begitu keluarga-keluarga yang kena kena tuh tahu, bagaimana transaksi dan sebagainya ya, ini yang kita tidak inginkan.

Yang selanjutnya masih tempat rehabilitasi Pak. Karena kita ada harapan nanti di undang-undang selanjutnya ini, setelah perubahan, memang rehabilitasi itu menjadi perhatian ya. Masih tempat rehabilitasi, banyak ditemukan di lapangan bahwa tempat itu tidak layak Pak ya, saya enggak ngerti angkanya di mana ini, saya mau lihat jadi

angkanya enggak ketemu ya, cuma pagu-pagu kasar semua ya, tidak sehat, bahkan pengelolaannya tidak profesional ya, SDM Administrasi kurang bermutu, ini yang saya dapatkan. Dengan anjuran sekarang bagaimana Pak, kira-kira menyiasati tempat-tempat rehabilitasi itu betul-betul menjadi tempat yang standar baik ya, jangan untuk dapat standar baik itu dia harus menarik kocek lagi, apalagi, dan sebagainya. Hatta masuk rehabilitasi aja disuruh bayar Pak kadang-kadang

Secara umum kami berharap dengan kepemimpinan Pak Petrus ini, di era menghadapi pemilu begini, ini transaksional di mana mana besar Pak, apalagi udah ada isu-isu besar menyatakan, bahwa narkoba ini berbalik, berputar gitu, datang ditangkap, yang sini begini-begini, yang sini begini-begini, ujung-ujungnya muter di situ-situ lagi. Nah ini perlu penjelasan yang kuat menurut saya.

Nah semoga Pak Ketua di pertemuan hari ini, saya pikir kita perlu dalami, kalau belum bisa saat ini, kita cari waktu khusus untuk memutuskan ya, angka untuk BNN, dan menurut saya angka yang diminta BNN sangat minim ya, sangat mudah untuk kita memutuskannya. Tinggal masalahnya adalah bagaimana benar-benar antara direncanakan dan pelaksanaan, makasih Pak Petrus dan kawan-kawan semua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Egah silakan. Setelah, setelah itu.

F-P NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Shalom
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Kepala BNN dan seluruh jajaran.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mencermati bahwa, awalnya kami justru bingung di awal Pak, mungkin apa pemahaman saya, karena beberapa mitra usulan tambahan itu kan kalau tertulis di sana satu triliun delapan delapan kosong tujuh sekian-sekian, tapi untung ada di bawahnya itu dua ratus lima puluh miliar, harusnya saya tadi berpikirkannya tambahannya jadi sampai tiga, tiga triliun sekian, tapi mungkin ini beda-beda institusi, sehingga beda juga untuk memberitahunya.

Nah saya masuk kepada program kerja dengan Pencegahan Daya Mas, kemudian ada hukum, kerjasama, itu dan seterusnya bukan berarti tidak penting Pak,

tetapi kembali lagi, karena kami, kebetulan saya juga keliling di dapil dan dapil kami itu lebih dari tujuh puluh persen warga binaan di dalam karena narkoba, Pak Roy Siahaan tahu betul, beliau mantan BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, secara khusus saya melihat anggaran di bidang rehabilitasi ini, menurut saya sangat minim, ini mungkin kalau nanti Komisi III menyetujui, saya minta ini difokuskan, terutama, tadi seperti yang mendahului Pak Habib Abu mengatakan, tentang rawat inap. Nah itu mungkin kita semua ya Anggota Komisi III masing-masing dapil pasti menginginkan, merindukan ada panti rehab, kalau tidak dalam skala besar, harapan kami, ini menjadi atensi dan program yang prioritas, yang sangat dibutuhkan, karena pencegahan sudah tentu sosialisasi, edukasi, tidak hanya dilakukan oleh BNNP, karena kami di provinsi, BNNK tidak, tetapi oleh juga Pemimpin-pemimpin Daerah, oleh para guru, oleh pemuka agama, itu secara simultan dilakukan secara bersama-sama. Nah oleh karenanya penekanan saya, saya mohon atensi bahwa, itu menjadi perhatian, karena saya lihat *client*, untuk rawat inap di BNNP atau BNNK hanya tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan orang Pak, kalau berbicara skala provinsi, ini enggak, enggak ada apa-apanya, nah ini harus dipikirkan.

Kemudian saya masuk kepada halaman yang berikut, saya, kami memang tidak masuk kepada bentuk secara rinci, tetapi saya mohon penjelasan dalam *output* Proyek PNnya, yaitu di poin sembilan dan sebelas, di sana kan ada SMI, SMP, SMU sederajat yang memperoleh pengembangan *soft skill*, kemudian di nomor sebelas yang laporan pengembangan *soft skill* di SMP, SMU sederajat, atau pusat. Saya pengin ada penjelasan, apa sih maksudnya, karena di sana di targetnya satu laporan, kemudian di rupiahnya di anggarannya sudah tiga koma satu tujuh sembilan miliar, nah paling tidak kami tahulah.

Nah kemudian berikutnya adalah BNNK secara berjenjang ada di provinsi. Nah semua Anggota Komisi III, sekali lagi bukan pengin tampil kaya banci tampil gitu Pak maksudnya, tetapi paling tidak, ketika program-program BNN itu di tingkat provinsi, yang, sekarang kan Bapak ketemu kita ini, nah tetapi kalau di dapil ya kita diajak, karena masyarakat kita itu butuh sentuhan dari kita. Nah walaupun kami-kami ini mungkin agak bawel, tapi ternyata apa yang kami berikan sentuhan kasih sayang, sosialisasi dari kami, itu sangat berguna bagi masyarakat di dapil kami. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon, panti rehabilitasi tidak di skala besar, skala kecil menjadi prioritas. Kemudian sekali lagi dalam program-program apa pun, Anggota Komisi III secara berjenjang dilibatkan, dalam arti tidak untuk ikut intervensi kegiatan proyeknya, tetapi dalam kegiatan edukasi sosialisasi dan seterusnya.

Saya kira ini Pimpinan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Jacki Uly bisa dilanjutkan, Nasdem usulan.

F-P NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Terima kasih Pimpinan, Pak Petrus beserta jajaran yang saya banggakan.

Mencermati dari pertanyaan tadi mengenai masalah anggaran. Karena memang ini rapatnya anggaran, kami melihat ada pengajuan tambahan anggaran satu triliun kalau enggak salah. Kalau kita lihat dari ancaman yang dihadapi, sebenarnya Pak Petrus atau dari BNN bisa menaikkan sedikit jumlah untuk tambahan, karena kita sudah bergerak pada alam sekarang, di mana penindakan terhadap narkoba ini lebih banyak diarahkan pada ke arah pencegahan dan rehabilitasi, dan itu saya yakin membutuhkan biaya tidak main-main. Kami baru keliling Eropa kemarin, ke Spanyol dan, eh ke Portugal, di situ juga ditemukan bahwa mereka yang pemakai itu lebih banyak di, di apa diobati, sehingga mereka baik, kecuali pengedar itu mereka memang masih berhadapan dengan hukum. Makanya di situ perlu ada suatu kolaborasi atau kerjasama yang baik antara Badan Narkotika dengan Kepolisian, peringkatnya yang menentukan tuh Polisi nanti, pengedar atau tidak.

Mengingat sekarang kita sudah sampai pada era di mana ada apa, *restorative justice*, yang lebih banyak memberikan tindakan yang bersifat tidak terlalu keras, kalau menurut saya tidak terlalu keras, karena penjaranya penuh, ini penjara mesti dikurangi, menterinya berteriak bahwa penjara bisa dikurangi, artinya orang yang dimasukkan ke penjara pun mesti dikurangi, di antaranya katanya di Indonesia mereka masuk di penjara itu, kebanyakan orang dari narkoba. Jadi tentu saja pihak BNN sendiri sedang memikirkan, bukan sudah memikirkan, sudah melaksanakan Pak, langkah-langkah di mana kita bisa mengurangi jumlah orang masuk penjara karena masalah narkoba. Sedangkan di Eropa di mana yang kita kemarin pergi, mungkin Pak Petrus banyak keliling di sana, kita bisa lihat bahwa, hanya sekedar memakai itu sudah tidak masuk lagi, mereka yang diobati, dididik, dan sebagainya, dan ini program ini sudah masuk juga.

Jadi saya mohon pada dari pihak BNN, kalau mengajukan anggaran kasih saja yang agak besar Pak, karena saya tahu ini kasusnya berat sekali tugasnya Pak. Kalau hanya sekedar satu triliun sekian, saya yakin itu kawasan diawasi luar biasa. Contoh, saya dapil saya di NTT, itu ada perbatasan dengan Timor Leste, bahwa perbatasan ini rawan sekali, karena saya kemarin juga ke perbatasan Kalimantan, sebagai Tim Pengawas Perbatasan, saya berangkat ke sana dibawa, saya juga melihat bahwa warga, sudah perdagangan narkotik melalui perbatasan sangat besar, berapa biaya yang bisa dibangun, kalau Bapak membangun saja interdiksi di situ, itu besar biayanya, karena saya melihat, waktu saya jadi Manado dulu, interdiksi itu dibangun dengan pihak Amerika Serikat kalau tidak salah dibangun disitu, beserta lembaga untuk membina, merehabilitasi, dan sebagainya, termasuk pelatihan anggota dari BNN atau Badan Narkotika.

Jadi saya minta tolong nanti coba dianu lagi, dan anggaran yang saya lihat tadi, waduh sayang sekali kalau kita ndak mengajukannya lebih besar, ini mumpung bukan mumpung, tapi saya rasa negara juga bertanggungjawab masalah ini, ini rusaknya generasi ini karena masalah narkoba, tidak main main ini, ini sama dengan kita bertempur, terus generasi kita ditembaki orang atau pasukan kita ditembaki orang, kita bisa mesti dihitung sama dan narkoba ini, berjatuhan korbanya masal. Jadi saya rasa demikian yang perlu untuk dipikirkan Pak Petrus untuk masalah anggaran ini, saya rasa demikian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Kanda Wayan silakan.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Menggaris bawahi beberapa pasal saja, karena sudah banyak dan lengkap disampaikan.

Pertama-tama mengenai empat ratus empat belas desa, ini beberapa rekan sudah mengingatkan, juga rekan saya sudah mengingatkan juga. Sebagai Anggota DPR, ketika desa-desa di Dapil Anggota yang bersangkutan ada program, apa salah, masalahnya, kita ... ini tapi langsung bersama-sama bertemu masyarakat, karena yang terus menerus akan ada di masa kan kami ini, ikutlah mengawasi program ini, itu satu.

Dua, ada empat ratus empat belas, jujur saya akui, apakah ini sebuah malapetaka, musibah, salah satu daerah yang di mana desa-desa dimasuki narkoba, Bapak udah tahu itu di Bali. Itu ada berapa desa di Bali, kalau boleh nanti di luar forum ini atau secara di luar forum, saya diminta datanya, supaya saya bisa komunikasi lebih baik. Itu mengenai empat ratus empat belas desa, karena tadi Pak Anca sudah banyak sekali bicara soal ini, saya tidak ingin mengulangnya.

Masalah yang kedua, masalah rehabilitasi. Setiap rekan yang ikut ke Portugal, pasti enggak tahan untuk diam, pasti ingin bicara rehabilitatif, kenapa, luar biasa menarik Pak. Jangka pendek atau jangka panjang, Indonesia yakin akan mengikuti pola itu, kalau tidak sekaligus, pasti bertambah, kenapa, dulu di Portugal juga banyak orang bunuh diri, banyak pencurian, banyak perampokan, bahkan perampokan itu disebabkan karena, pada waktu itu pemakai masih dipenjarakan, bahkan ada yang didenda. Yang didenda kalau enggak punya uang itu mencuri, tapi begitu dibebaskan pemakaian narkoba dalam pengertian pemakai tidak dihukum, drastis perubahannya, hasilnya luar biasa. Dulu negara-negara Eropa sekitarnya tidak mau mendukung pola yang ekstrim ini, tapi Portugal membuat undang-undang baru Pak, undang-undang dibikin. Jadi mudah-mudahan semangatnya sama. Pernah dengar saya selentingan apa benar apa tidak, BNN kita sudah membikin MOU juga dengan Portugal, tentang masalah narkoba ini.

Oleh karena itu, tidak maksud mengajari ikan menyelam Pak, kami tinggal mendorong agar ... hukum yang ada itu lebih dimatangkan lagi, diperdalam lagi, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi. Mohon maaf begitu sederhana cara mereka memberantas korupsi, BNN gedungnya kecil, tapi dibagi dua kelompok, pemakai urusan BNN, enggak ada yang lain kecuali rehabilitasi yang ditangani. Penindakan, Polisi, tidak ada lagi persyaratan di sana, apakah tiga kali, empat kali ketahuan, berapa kali pun, karena itu dianggap sebagai musibah, korban, tetap aja dia direhabilitasi. Di dalam rancangan undang-undang kita, masih ribet, masih banyak persyaratan yang menyebabkan orang tidak bisa direhabilitasi.

Dalam kaitan itu pertama menggarisbawahi, kalau dihitung seratus lima puluh delapan dibanding penyuluhan enam puluh tiga dan pembinaan masyarakat enam puluh tiga, memang anggaran rehabilitasi ini kelihatan besar, dua kali lipat lebih toh. Tapi kalau dilihat dan dibandingkan dengan bagaimana Portugal menangani pemakai

itu rehabilitasi, seratus lima puluh delapan ini sama sekali enggak memadai, saya mendukung rekan saya, Pak Jenderal ini, ini terlalu kecil, terlalu kecil, kecil luar biasa. Karena sekali lagi, suka dan tidak suka, Eropa yang dulu menentang dan tidak menyetujui undang-undang yang di Portugal, membebaskan narkoba, pemakai tidak diprotek, sekarang mereka sudah negara tetangga bersimpati mendukung, balik mendukung.

Maka berhubung berjejal-jejalnya LP, banyak eksekusi yang ditimbulkan, mari kita selain menaikkan anggaran untuk rehabilitasi, mari kita bersama-sama mendukung perubahan Undang-Undang tentang Narkoba Pak. Arahkan ke rehabilitasi, arahkan ke rehabilitasi semaksimal mungkin, pasti saya agak berat menyampaikan, tapi lebih baik sampaikan di depan, untuk nanti dicarikan jalan keluar. Pak kalau ada yang ekstrim seperti di Portugal, tentu BNN tugasnya hanya rehabilitasi dan pencegahan. Penindakan, biarkan Polisi yang yang menangani, tapi ini kan di Portugal. Walaupun BNN masih menangani penindakan, saya minta rehabilitasi itu dimaksimalkan semaksimal mungkin, enggak masalah, andaikata masih penindakan itu ada di BNN, tapi sekali lagi rehabilitasi jangka pendek atau jangka panjang, ini tidak bisa dielakkan, karena udah jelas positifnya program rehabilitasi.

Terakhir, jika kita mau membahas memaksimalkan rehabilitasi, seperti kata tadi itu kan undang-undang kuncinya Pak, kalau undang-undang ini masih seperti ini agak sulit, tapi kok saya bolak-balik, bolak-balik tidak menemukan ada biaya legislasi, padahal di depan mata kita ada pembahasan mengenai Rancangan perubahan Undang-Undang Narkoba, boleh dong, ini di enggak, di angka yang memadai, sehingga kita bisa membahas lebih mendalam, dan jika tambahan anggaran ini dibawa untuk legislasi, kami sama sekali tidak keberatan. Legislasi dan rehabilitasi memerlukan prioritas yang utama, khususnya legislasi jangka pendek, rehabilitasi tapi jangka pendek, jangka panjang, kita harus ke sana, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Arteria Dahlan silakan.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pak Pangeran yang saya hormati, yang saya banggakan,
Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Kepala BNN beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan.

Pertama-tama pastinya kami *men-support* mitra Pak, apalagi kita punya pengalaman yang panjang dengan Pak Kepala, yang memiliki komitmen yang kuat, untuk perang terhadap narkoba, belum pernah ada Kepala BNN yang punya *tagline war on drugs*, ini baru Pak Kepala. Kami sadar betul BNN ini memang fakir miskin anak terlantar ini, anggarannya kecil sekali, kasihan banget. Padahal sudah ada Darurat Narkoba tahun 1971 dicanangkan. Untuk *war on drugs* sendiri sudah disetujui sama Pemerintah, bahkan Pemerintah itu cukup mengacungi jempol, tapi tidak tercermin dalam politik anggaran, tidak tercermin dalam anggaran, tidak tercermin dalam kebijakan anggaran. Isu narkoba inikan tidak hanya isu penegakan hukum,

narkoba itu isunya adalah isu kesehatan juga, jadi kalau pendekatannya, pendekatan hukum, kembali ini kita ke rezim yang lama. Nah berkali-kali kami katakan dengan uang yang seperti ini, tentunya isu penegakan hukumnya, bandar pengedar, kan ada tiga klaster dan penyalahguna korban, nah kita bedakan. Bandar pengedar itu kan saya berkali-kali Pak Kepala, tembak mati Pak, makanya kemarin kami ke Kalimantan Selatan, itu pengedar dan bandar itu ada yang dibuat mati, bagi saya halal Pak, jangan bicara HAM, karena ada keluarga korban bicara HAM, kalau dia bicara HAM buat LP baru, ini masuk sindikat narkoba, enggak ada yang bicara namanya pengedar bandar itu jangan bicara HAM, enggak ada di republik ini HAM-HAM untuk mereka. Nah tapi kita harus tegas, inikan mengurangi anggaran BNN, baru ketemu bandar, *jederrrr* mati, mati, makin lama makin gila. Isu kesehatannya memang harus kita perhatikan betul, pertama, pertama orang enggak akan mau makai narkoba lagi, bisa enggak, bisa Pak. Bapak lihat bagaimana rokok itu Pak, di generasi sekarang nih, ponakan-ponakan kan pengen pakai rokok lagi Pak, bisa itu, yang halal aja bisa berkurang, yang dilarang ini harusnya lebih bisa lagi. Nah ke arah sini apa ini yang harus dikerjakan, kan tentunya harus menjadi bagian dari pencermatan dan program kegiatan turunannya.

Yang kedua penyalahguna Pak. Saya tidak melihat di program, teman-teman di BNN merespons revisi Undang-Undang Narkoba, paska revisi ini, penyalahguna direhab, tapi tidak hanya penyalahguna, bandar pun direhab Pak, pengedar pun direhab, katanya mereka, walaupun kita berbeda pendapat, nah ini kan juga harus di direspons, apa responsnya, adalah bagaimana balai-balai rehab hadir dengan cepat. Kita enggak tahu besok tiba-tiba ada revisi dan revisinya kabul, enggak ada enam bulan ini, tok selesai, balai rehabnya enggak ada, nah ini juga belum tentu tercemin.

Tadi dikatakan sama teman-teman, wah ini dananya kekecilan, dananya terlalu besar udahlah, hari ini kita bicaranya yang apa adanya, apa adanya apa, ini dananya enggak bisa lebih ini, satu koma delapan tiga T, satu koma delapan tiga T ini wajib hukumnya kita setuju. Nah satu koma delapan tiga T ini juga mau dikemanakan, ini yang kita bicarakan Pak, wong kita dukung anggaran ini Pemerintah aja bingung nyari uang dari mana, anggaplah angkanya segini, anggaplah dengan angkanya segini kita semua setuju, berkat kita lihat capaian BNN selama ini di bawah kepemimpinan Pak Kepala. Kenapa saya setuju Pak, pertama BNN ini serius juga, belanja pegawainya hanya delapan lima ratus enam puluh empat, ya hampir empat puluh persennya, yang lainnya dia pakai untuk belanja modal dan non operasional. Nah jadi kan kita juga kelihatan, ternyata dia tidak hanya untuk gaji pegawai, banyak juga kementerian lembaga yang gaji pegawainya, belanja pegawai yang besar Pak, kalau ini kan sudah, saya katakan posturnya dicoba untuk menjadi postur yang terbaik di tengah keterbatasan. Namun kita juga harus melakukan pencermatan secara jelimet Pak, ini kan postur yang ada di sini, yang Cegah enam puluh tiga, Daya Mas enam tiga, Rehab satu lima delapan ya, kami pun juga ingin tahu, dipakainya ke mana enam tiga, turunannya itu apa saja gitu lo. Karena enam tiga ini bukan punyanya BNN Pusat, ini kan terdistribusi mendasarkan keadilan sosial ke BNNP dan K. Angka segini, saya pastikan lagi Pak, pastinya nanti ujung-ujungnya di kabupaten kota tuh, pemberantasan tiga puluh tujuh juta lagi, ini kan uang-uangnya kasihan juga ini, ini tidak akan, padahal kami setiap reses itu ketemu, teriaknya begitu Pak, nah ini juga harus jadi bagian pencermatan. Nah mudah-mudahan Pak Kepala saya apresiasilah, anak buahnya Pak Kepala ini luar biasa merah putih tiga puluh tujuh juta masih kerja, ini kalau kita di Polisi belum tentu jalan Pak, tapi ini tiga puluh tujuh juta itu minimal tiga temuan Pak, minimal tiga kasus loh, kalau kita pukul rata ini teman-teman

kerjanya, yang dilawan adalah bandar, pengedar, yang penghasilannya mungkin tiga puluh tujuh miliar satu hari, ini tiga puluh tujuh juta satu tahun. Nah ini kami mohon juga nanti di dicermati lagi lah lebih jauh.

Berikutnya mengenai komposisi Pak. Komposisi ini kan masih pada halaman yang sama, ini kan BNN instansi vertikal, di pusat saja sudah lima puluh sembilan persen, nah tentunya kita ingin tanyakan ini, pusat ini punya cita-cita, saya ingat benar Pak Kepala, kita kan punya cita-cita bagaimana balai rehab nambah Pak Kepala. Nah kemudian bagaimana pusdatinnya efektif, bagaimana laboratoriumnya nambah, ini yang saya lihat cuma satu jadinya Pak, cita-cita agung kita ini enggak nyampai, saya khawatirnya zamannya Pak Goris, Pak Petrus itu enggak ada yang cita-cita kita kemarin Pak, nambah balai begitu banyaknya, jangan dikasih ke swasta lagi nanti balai Pak. Nah ini kita pikirin ini, kalau perlu nanti konsepnya tidak dalam bentuk hadirnya lab atau hadirnya balai, tapi kerjasama Bapak sama yang punya rumah sakit sekarang, tapi semua itu adalah BNN yang punya kendali Pak. Nah ini harus dibuatkan ini bagaimana caranya, untuk mengantisipasi kekurangan uang itu tadi Pak.

Mengenai prioritas nasional. Saya pikir prioritas nasional itu, saya lihat kalau BNN kalau punya acara oke lah ya. Nah kami ingin lagi Pak yang di sini, ini harus ada, kan ada lima belas poin Pak, satu satu ini harus ada *landmark*-nya, yang gede deh gitu apa, kan cuman buat lima belas kegiatan Pak, seperti kami sama BNPT kemarin, akhirnya kita buat di Kabupaten Malang, itu yang terpapar narkoba kita kasih lahan lima belas hektar gratis, gratis, lima belas hektar gratis, kemudian dia bisa nanem, hasil tanamnya saya beli lagi Pak, kita beli lagi, kita jual. Nah yang kaya kaya gitu tuh Pak, ada tiap ini ada kegiatan, kalau boleh juga diikutsertakan kami Pak, misalnya yang kunjungan-kunjungan yang ke titik rawan narkoba, lahan tanaman narkoba dan sebagainya.

Berikutnya mengenai Desa Bersinar. Saya apresiasi ini teman-teman yang di kabupaten, sama pasukannya Pak Kepala ini, begitu responsif kalau kita berinteraksi sama BNN di daerah, turun, enggak hanya turunnya dari kabupaten yang dari pusat pun juga mendampingi. Ini Desa Bersinar empat ratus empat belas desa ini tambahan atau dua plus tiga yang kemarin Pak, kan kemarin nada dua plus tiga kan, nah. Kemudian juga kalau Desa Bersinar itu kriterianya apa, mungkin kalau BNN tidak punya uang banyak, saya akan siapkan Desa Bersinar setiap tahun sepuluh, saya yang tanggung Pak. Jadi saya buat Desa Bersinar, kan yang penting kepala desanya siap, semuanya siap, nanti kita kerjasama Pak, saya bawa Pemerintah Kabupaten kami untuk buat itu, kalau perlu dua puluh. Nah tapi harus apa, Desa Bersinar kan tentunya harus bisa menjadikan contoh, saya enggak bicara masalah uang, uangnya udah ditanggung sama kita ya kepala desa dan kawan kawan. Kita minta di Desa Bersinar kalau ada orang main narkoba tembak mati halal, itu perbedaan Desa Bersinar dan tidak, tidak hanya agen pemulihannya saja Pak, kan sekarang ini kan ada agen pemulihan, ada apa, ada apa, dan sebagainya.

Nah kami minta betul dibuatkan lagi konsep kerjasama untuk pembentukan Desa-desanya Bersinar yang swa apa namanya itu, yang ditanggung sendirilah gitu loh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibuatkan konsep mengenai Desa Bersinar gitu.

Berikutnya kami juga minta betul Pak, mengenai balai rehab, kemudian perlakuan terhadap yang namanya *client* yang sakit ini Pak, rawat inaplah, kemudian

rawat jalan, rawat inap di balai, rawat inap di balai yang bukan punya BNN, punya swasta itu tolong juga kita, kita segerakan. Nah ini kan masalahnya kan tidak masalah angka-angka semata, kita bisa lebih cerdas lagi, kita paksa yang sudah punya Perda P4GN ini untuk bekerjasama dengan kita, kuncinya kan di situ, yang sudah punya Perda P4GN, saya menawarkan diri untuk di tempat kami Pak, ini bisa dibuat lebih cepat, kita menawarkan untuk yang seperti-seperti yang tadi saya katakan, Desa Bersinar, rumah sakit atau balai kesehatan, itu bisa kita kerjasamakan sebagai *pilot project*.

Berikutnya untuk masalah *task* Pak. Ini operasional dan pengadaan peralatan, kalau angka-angka kita semua setuju, tapi yang ini untuk pengadaan peralatan apa Pak Kepala, kalau masalah besarnya kita enggak bicaralah, semuanya setuju nih ya.

Yang berikutnya mengenai Bidang Hukum dan Kerjasama. Nah kami mohon sekali sosialisasi perubahan Undang-Undang Narkotika, kalau perlu jangan sosialisasinya Pak Kepala, kami minta benar teman teman BNN itu kumpul, suatu BNN kumpul, dibuat tim khusus untuk bicara mengenai Undang-Undang Narkoba, kami butuh sekali yang namanya daftar inventarisasi masalah versinya BNN, tapi bukan katanya Pak Petrus, tapi hasil semuanya Pak Petrus, dari kabupaten, kota provinsi dikumpulkan, rapatlah itu ya, nanti DIM-nya diberikan ke kita, pastinya mereka yang punya pengalaman dan bisa menutup celah-celah yang sudah kita pikirkan di RUU Narkotika ini, revisi.

Ini yang terakhir balai rehab. Kami minta betul bahwa rehabnya kalau bisa ditambah itu ya, dan kemudian diberikan kerjasama dengan, dengan pihak swasta.

Sekali lagi terima kasih Pak Kepala sama teman teman tetap semangat, uangnya enggak begitu banyak, ini kita merah putih, mudah-mudahan dapat pahalanya tidak di dunia, tapi di akhirat sana.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sudah banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan Komisi III, kami persilakan Pak Kepala BNN untuk menjawab, silakan.

KEPALA BNN:

Terima kasih Pimpinan, kami akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan, namun perlu kami sampaikan bahwa, pertanyaan hampir sama, terutama untuk *breakdown* anggaran, kalau diizinkan oleh Pimpinan, daripada kami membaca seluruh satu-satu per *breakdown* anggaran, apakah bisa kami laporkan secara tertulis. Kami laporkan secara tertulis, karena yang kami sampaikan tadi adalah memang dari kegiatan anggaran, kalau baca satu buku Pak, satu buku anggaran, kalau disetujui Pimpinan, tetapi kami akan sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu.

Pertama untuk pertanyaan Pak Hinca, tadi sudah ini dengan Pak Nurdin, kemudian karena Hinca enggak ada, kemudian Pak Supriansa juga tidak ada, kami *skip*.

Kemudian Ibu, anggaran yang kemudian advokasi tanggap, jadi kami memang ada program Desa Bersinar Bu, kemudian ada juga program untuk Kota Tanggap, kota. Jadi ini bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan kemudian untuk *breakdown* anggaran, nanti kami tidak bacakan satu per satu, tapi kami akan laporkan secara tertulis Pak, karena kalau *breakdown* kami bacakan saya rasa waktunya semuanya, kalau seperti pertanyaan tadi Pak, satu kelompok anggaran buku yang harus kami baca.

Kemudian *outcome* yang kemudian dalam kaitan dengan *soft skill*, memang ini kita lakukan juga untuk mendukung dalam rangka bagaimana anak-anak, kemudian atau juga penyalahgunaan narkoba, mereka bisa diterima di masyarakat. Jadi di samping program Desa Bersinar, ada juga kita di Kota Tanggap. Jadi kalau desa kita lebih banyak kepada kerjasama, tentunya kita melalui tetap Pemerintah Daerah, kemudian mem-*breakdown*, mana desa-desa yang, karena kita tetap bekerjasama, kita tidak sendiri. Untuk anggaran nanti kami akan laporkan secara tertulis Bu.

Kemudian Pak Habib, Habiburrahman untuk rehabilitasi, kalau dalam postur anggaran kita ini sebenarnya sudah besar, untuk postur anggaran, karena kita harus bagi juga Pak, dari yang menyangkut juga dengan pernyataan atau pertanyaan dari Pak Arteria, bahwa memang kami sudah tidak bisa apa-apa ini, dari satu koma delapan tiga triliun ini, karena kami juga pada kesempatan ini Pimpinan, mengucapkan terima kasih, karena pada waktu pembahasan pagu indikatif, kami sudah memperoleh tambahan sama dengan pertanyaan tadi Ibu Egahni, mohon izin Bu Egahni, pertanyaan Ibu menyangkut juga dengan ini, bahwa kami dari pagu indikatif sudah keluar sekarang anggarannya atas dari dirjen, dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, sehingga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Komisi III, karena dukungan Bapak dan Ibu kita mendapatkan tambahan anggaran, itu karena rapat kita sebelumnya. Jadi sekarang bukan kami untuk penambahan anggaran, karena rapat sebelumnya sudah dilakukan dan sudah mendapat dan itulah sudah maksimum yang ada.

Kemudian Pak Nasir, terima kasih Bapak selalu mendukung dan saya selalu mendapat laporan Pak, kalau Bapak selalu di Aceh, Bapak amat sangat dekat dengan KBNNP, dan kami juga akan mengoreksi, kalau memang untuk kegiatan kalau masih kurang, namun yang kami dapatkan laporan setiap kegiatan Bapak di sana, amat sangat dekat dengan KBNNP Aceh Pak.

Kemudian untuk kata-kata lain berkaitan dengan ini, mungkin kita juga akan *focus group discussion*-kan untuk saran Bapak, berkaitan dengan usulan Bapak untuk mencari terminologi yang lain untuk sosialisasi, karena selalu ada perubahan Pak dalam kita, kita gunakan intervensi, misalnya sosialisasi dan sebagainya. Untuk program memang kami berusaha Pak, namun pada tahun ini memang kita lebih memfokuskan anggaran untuk kabupate-kabupaten yang kami sudah sebutkan itu kami serahkan ke BNNP Pak, tahun depan kami akan lihat, apakah dari postur anggarannya ada, mau kita kelola dari pusat, namun perlu saya laporkan bahwa kita juga ini mengajak kerjasama dengan *stakeholders* yang lain Pak, kami menggunakan anggaran untuk mengajak yang lain, karena kami sendiri anggarannya Bapak sendiri sudah tahu bahwa amat sangat terbatas untuk melaksanakan **GBAD**, tapi, karena program ini adalah juga internasional, program bagaimana merubah, namun memang

perlu juga terima kasih dari saran Bapak dan koreksi, kami akan perbaiki Pak, nanti kami akan laporkan ke Pak Nasir juga bersama-sama.

Kemudian Pak Habib Aboe Bakar, untuk fasilitas rehabilitasi kami hanya punya enam Pak, kemudian kami gratis Pak, jadi kalau tadi Bapak katakan bahwa kita minta bayaran, untuk rehabilitasi di BNN tuh gratis Pak. Rehabilitasi untuk komponen masyarakat memang secara dari Undang-undang mereka boleh Pak membuat, dan itu kita juga ada satu direktorat, untuk mengontrol itu, namun untuk BNN Pak gratis. Jadi mohon izin Pak, kami tidak menerima bayaran untuk, dan kami berterima kasih karena Bapak amat sangat mendukung rehabilitasi, namun perlu kami laporkan, kalau untuk tempat rehabilitasi BNN Pak mungkin Bapak pada waktu berkunjung, kita terbaik di Asia Tenggara, itu menjadi contoh yang lain. Jadi enggak usah, sebenarnya kami juga pengen ke Portugal Pak, Pak Wayan, tapi tempat kita itu untuk Lido itu sudah well known Pak untuk di kelas Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia Pak untuk rehabilitasi kita, memang untuk jumlah orang yang direhabilitasi karena berkaitan dengan anggaran, kami masih minim Pak.

Kemudian yang Bapak sampaikan tadi, itu isu lama Pak yang muncul lagi di sosial media, karena ada kasus lain, saya rasa tidak ada hubungan dengan kegiatannya BNN Pak, jadi bukan dari, kami juga tidak menyinggung institusi yang lain, tapi itu isu yang lama dimunculkan kembali dan itu memang dengan ada isu-isu yang seperti sekarang di sosial media orang sebentar, dan mungkin juga seperti Pak Arteria bilang itu ya bandar-bandar itu juga berusaha mereka untuk menjatuhkan martabat aparat penegak hukum berkaitan dengan narkoba. Kalau Bapak katakan lagi tadi untuk tempat tidak layak, mungkin kalau kantor BNNP Pak, kalau tempat rehabilitasi kami layak Pak, kami hanya punya enam Pak, tapi kami berusaha untuk dengan anggaran yang ada, karena tempat kantor kita pun masih ada yang sewa Pak, jadi itu pak. Jadi memang kami akan berusaha dan mohon dukungan dari, terutama dari Habib Aboe Bakar, untuk terutama di wilayah pemilihan Bapak, untuk konstituen Bapak, untuk bagaimana, kami tidak bisa menyiasati tempat rehabilitasi Pak, karena rehabilitasi itu harus didukung dengan pakar-pakar yang sesuai dengan bidangnya. Terima kasih atas dukungan Bapak.

Kemudian Ibu, saya rasa kami sudah jawab tadi Bu, kemudian kenapa ada penambahan anggaran, karena usulan dari Bapak dan Ibu, pada waktu kami memaparkan pagu indikatif dan terima kasih sudah mendapatkan tambahan untuk kegiatan intelijen. Kemudian kami juga sering dilaporin Bu, kalau Ibu kegiatan di dapil Ibu, Roy sudah diganti Bu, dan yang penggantinya juga sudah dekat sekali dengan Ibu, dan kami berusaha Bu, sesuai dengan usulan sebelumnya, namun anggarannya ya tadi dikatakan Pak Arteria udah enggak bisa diapa-apain, ini udah tok satu koma delapan tiga triliun, kami pun bisa membangun yang tadi juga pertanyaan yang lain, tempat hanya satu tempat, itu pun tempat sitaan KPK Bu, tanahnya, kalau beli tanah juga enggak sanggup dengan anggaran yang ada untuk pembuatan laboratorium, jadi di Jawa Timur tapi tempatnya di Madura, itu dari sitaan KPK yang dihibahkan kepada kami.

Kemudian kami harus mengecek Bu tadi pertanyaan Ibu, terkait dengan analisis dampak. Kami melaksanakan kegiatan kepada SMP dan SMU sederajat, kami juga menggunakan university dan pakar-pakar yang lain untuk mengecek, apakah ada dampaknya kepada kegiatan dilakukan, jadi itu harus kita lakukan, untuk kegiatan yang dilakukan dari program yang kita lakukan.

Kemudian Pak Jacki Uly mohon izin Pak, untuk kegiatan kami ada pos interdiksi, ada enam pos interdiksi kami. Kemudian yang tempat yang Bapak sampaikan di Manado itu udah diserahkan kepada Kepolisian Pak, jadi dikelola oleh Kepolisian.

Kemudian untuk *restorative justice*, untuk narkotik kita tidak mengenal *restorative justice* Pak, tapi kita mengenal dengan Tim Asesmen Terpadu atau TAT, karena yang bersengketa Pak, kami rasa kami sudah jawab pada pertemuan sebelumnya adalah negara, kalau kejadian itu untuk restoratif, itu kejadian ada para pihak yang bersengketa, sementara kalau narkotik yang bersengketa adalah negara dan pelaku yang juga adalah *victim less*, pertanyaan juga Pak Wayan tadi, bagaimana dia pengguna, kemudian dia sebagai pelaku, nah itu *victim less crime*. Jadi kami akan tingkatkan Pak untuk, kalau bisa, kalau memang masih ada tambahan anggaran untuk kami buat pos interdiksi di NTT Pak, karena memang perbatasan dengan Timor Leste.

Kemudian Pak Wayan untuk empat ratus empat belas desa itu, itu kami ambil Pak, ditargetkan, tapi itu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah juga. Jadi dari seratus tujuh puluh tiga BNNP, BNNK dan tiga puluh empat BNNP, kemudian didapat desa itu, kemudian dilakukan program *inter...*, jadi kami tidak sembarang Pak menentukan, untuk desa di Bali Pak nanti kami akan sampaikan ke Bapak secara terpisah.

Kemudian masalah rehabilitasi, saya sama seperti Bapak Pak, saya amat sangat setuju untuk rehabilitasi, karena mereka juga perlu direhabilitasi, kemudian kaitan dengan undang undang ini ada Pak, kami sudah laporkan dalam pembacaan kami tadi, bahwa kami juga menyiapkan anggaran untuk dalam rangka amendemen undang-undang ini, untuk kegiatan BNN dalam rangka amendemen. Tapi untuk sarannya Pak Arteria nanti kami ini, karena DIM-nya kami harus lewat inter Kementerian Pak, kita enggak boleh langsung ini, tapi kalau masukan dari Bapak, kita boleh bisa buat masukan.

Kemudian dari Pak Arteria terima kasih Pak, Bapak mendukung kegiatan kita. Kemudian kaitan dengan politik anggaran, Bapak-bapak yang punya hak itu di sini Pak, kami tinggal menerima, dan kami sudah diberikan pagu anggaran yang seperti yang kami laporkan tadi.

Kemudian isu yang Bapak sampaikan, kami tetap mengikuti *standard operating procedure* Pak, kaitan dengan tembak menembak dan sebagainya. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa, minggu yang lalu kita juga, karena berbahaya bagi petugas kita melakukan *replaining* execution dan ada juga bandar yang ditembak Pak.

Kemudian kaitan dengan BNNK, itu kita bagi Pak dari anggaran, jadi yang tadi Bapak sampaikan lima puluh sembilan persen itu, itu termasuk belanja pegawai Pak, jadi bukan lima puluh sembilan persen, itu di pusat Pak. Jadi kami bagi sampai dengan di BNNK itu untuk belanja pegawai Pak, jadi kelihatan postur, karena belum semua BNNP atau BNNK yang sudah bisa untuk membayar gaji pegawai Pak. Jadi harus kita koordinasikan, khawatir penyimpangan dalam, sehingga harus terkontrol dan bukan semuanya untuk anggaran pusat, itu turun sampai dibawah, termasuk juga dengan anggaran pemberantasan Pak, untuk Tim Asesmen Terpadu tuh anggaran yang seperti ada di pusat, tetapi diluncurkan, sekarang udah habis pak anggarannya, jadi

kami sekarang juga udah enggak ada untuk anggaran TAT-nya, sementara kasus yang harus melibatkan TAT ya banyak sekali Pak.

Kemudian tadi Bapak bilang untuk kerjasama, itu kami lakukan Pak. Jadi ada dengan sebutannya, kita salah satu direktorat itu untuk instansi pemerintah dan juga dengan komponen masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi Pak, untuk kita kontrol, tapi untuk *breakthrough* daripada kegiatan itu, kita siapkan yang sudah saya laporkan tadi, yang disebut dengan intervensi berbasis masyarakat. Karena duitnya sekarang hanya cukup untuk delapan ribu sekian Pak, untuk kita melaksanakan merehabilitasi, itu yang baik rawat inap, rawat jalan, dan intervensi berbasis masyarakat, kalau kita tambah lagi, berarti kita menggeser yang lain itu dan pembahasan anggaran yang mungkin kami laporkan kepada dewan ini kan kami juga dikontrol, baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Bappenas, untuk ada tripartiat.

Kemudian terima kasih Pak dukungan Desa Bersinar dari Bapak, mudah-mudahan Bapak kuat Pak, karena kalau terus-menerus nanti betul-betul melaksanakan, karena dana aja yang Bapak, Bapak kasih ke kami untuk melaksanakan itu, kami ini ya, tapi ya terima kasih kalau memang Bapak mau sampaikan untuk membantu Desa Bersinar bisa kita lakukan, tentunya dengan kita sebut dengan komponen masyarakat, Bapak dikategorikan bukan sebagai Komisi III, tetapi dari komponen masyarakat.

Kami kira Pimpinan itu jawaban dari kami, kemudian yang tadi untuk *breakdown*, saya adanya ini, tapi kami akan laporkan Pimpinan secara tertulis semua *breakdown* daripada kegiatan. Karena berkaitan dengan waktu untuk kita rapat dengar pendapat ini, sehingga kami tidak *breakdown* sampai, kalau ini kami akan laporkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seluruh *breakdown* daripada kegiatan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Petrus.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Interupsi Pimpinan, interupsi sedikit.

KETUA RAPAT:

Siap.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Dua menit lah. Pak Kepala saya melihat dari laporannya ini sebetulnya sudah ada sebagian, jadi Prioritas Nasional tahun 2023 itu yang *output* proyek PN nya sudah ada, cuma seratus dua puluh empat miliar, padahal anggarannya itu kan satu koma delapan triliun. Nah ini yang belum misalnya di sini, ini Desa Bersinar empat satu empat desa, apakah ini termasuk di sini program pemerintah udah ada, tapi yang lain misalnya untuk pendidikan, untuk rehabilitasi, pelatihan, itu tidak ada anggarannya.

Jadi kalau yang tadi di-*breakdown* tadi, tidak usah sebukunya itu, garis besarnya aja, untuk meyakinkan kami ke Badan Anggaran besar, bahwa uang satu koma delapan triliun itu digunakan untuk ini, ini, gitu, untuk belanja pegawai kan tuh, belanja modal, belanja pegawai dan belanja operasional, belanja barang, operasional kan di belanja barang. Nah itu besarnya berapa, terus uraiannya garis besarnya saja, tidak usah *detail*, karena kita tidak sampai ke satuan tiga. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Nurdin. Tayangkan dulu kesimpulan kita terkait dengan kesimpulan kita Pak Nurdin.

KEPALA BNN:

Mohon izin Pimpinan, kalau memang ini kami baca sekilas.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu Pak.

KEPALA BNN:

Oke.

KETUA RAPAT:

Coba baca ini, saya baca dulu ya.

Komisi III DPR RI meminta penjelasan lebih lanjut dari Kepala Badan Narkotika Nasional atas pagu anggaran 2023 setelah Nota Keuangan Presiden Republik Indonesia sebesar satu koma delapan triliun lebih, dengan melakukan pendalaman dalam rapat kerja kembali terhadap RKA-K/L 2023 pada hari Selasa.

Jadi kita melihat belum adanya penjelasan *detail* terkait angka-angka program, jadi Bapak enggak usah kirim ini, nanti kita ketemu tanggal 13 bersama dengan PPA III, PPATK nanti, gimana kira-kira Bapak Ibu. Bisa Pak Petrus tanggal 13 kita itu *breakdown* yang Bapak sampaikan nanti.

KEPALA BNN:

Saya rasa kami yang kami sampaikan kan sudah ini semua pimpinan, dan sudah, kalau hanya untuk *breakdown* kami akan kirim tentu.

KETUA RAPAT:

Gimana.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua, Pak Ketua gini loh Pak Ketua, kalau saya sih mencari apa ya, kalau tadi kita sama PPATK kan Pak Ketua enggak datang ya, itu sama PPATK itu kenapa pendalaman, karena memang satu tidak diuraikan secara elaboratif, dua ini sama ini BNN sama PPATK. Tapi ada perbedaannya, pada saat di BNN ini semua pertanyaan ini sudah ditanyakan, yang tadi masih banyak teman-teman yang belum bertanya, atas dasar itulah ditunda ke Selasa, kalau inikan semuanya sudah bertanya semua dan yang bersangkutan ini Pak Kepala siap untuk memberikan dokumen-dokumen.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Arteri,

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Itu Pak Ketua, saya hanya menyarankan kepada.

KETUA RAPAT:

Ngerti substansinya, yang lain oke ya.

F-P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Pak Pangeran, Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Jadi mungkin menambahkan sedikit saja. Apa yang dimaksudkan oleh Pak Nurdin tadi dan mungkin beberapa dari kami semua, kita semua ini, ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan, dari rapat kali ini, yang akan di-*follow up* oleh, yang kita meminta di-*follow up* oleh Pak Kepala BNN. Nah sekarang tinggal kita menyampaikan kepada Pak Kepala BNN saja menurut saya. Dari catatan-catatan yang kita sampaikan tadi, Pak Nasir, Pak Nurdin, saya dan semuanya saja, Pak Arteri, nah bagaimana, apakah catatan-catatan itu bisa dilengkapi atau tidak, nah itu yang nanti akan menjadikan kesimpulan di dalam rapat kita kali ini, terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Jadi kan setelah kita rapat dengan mitra kerja, kita akan serahkan ke Banggar besar, nah untuk menjelaskan itu, kalau kita tidak berikan penjelasan dari angka-angka ini, sulit kita menjelaskannya di sana. Jadi saya kira tinggal tambah itu aja, yang,

yang belum ini kan yang satu dua empat miliar sudah ada penjelasannya, tapi yang satu koma delapan mungkin belanja pegawai berapa gitu kan, terus belanja modalnya apa saja, nah ini belanja barang sudah mulai terlihat, sehingga angka itu kalau ditanya di Banggar besar kita juga bisa ikut menjelaskan. Apakah ini mau dijelaskan besok atau apa silakan, kalau misalnya bisa, sebelum kita rapat ke Banggar besar, ya kita terima saja sekarang itu laporannya, tapi penjelasan itu sudah disusulkan, begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, coba sempurnakan ininya kesimpulan rapat kita, tayangkan dulu, tayangkan, kita sempurnakan.

KEPALA BNN:

Pimpinan sebelum kesimpulan, kalau memang seperti yang disampaikan Pak Nurdin kami akan bacakan sekarang. Jadi saya rasa tidak perlu untuk kita ketemu lagi, kalau memang kami akan bacakan, tapi saya rasa sementara yang sekilas seperti catatan yang Ibu sampaikan yang tadi.

Nah ini penjelasan kami setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju kan?

KEPALA BNN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Nah berarti tanggal 12 Bapak bisa sampaikan nanti. Jadi kita menerima hari, ini menerima, menyetujui.

F-P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Izin ketua. Kalau hari ini menerima, berarti tidak meminta penjelasan, saya menawarkan kalau memang ada yang mau disampaikan oleh Pak Kepala BNN silakan disampaikan.

KEPALA BNN:

Kami sampaikan secara. Mohon ijin Pimpinan.

F-P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Baru kemudian nanti kita semua menanggapi. Saya selesaikan dulu Pak Kepala mohon maaf ya. Jadi kita berikan waktu kepada Pak Kepala BNN, saya usul seperti itu, untuk bisa menjelaskan dari catatan-catatan tadi yang kita sampaikan, nah

dari situ nanti mungkin akan kita tanggap, apakah kemudian akan kita terima sekarang ini, atau kita tetap masih meminta penjelasan lebih lanjut.

KETUA RAPAT:

Pak Petrus silakan.

KEPALA BNN:

Izin Pimpinan, apabila karena dari Pak Nurdin dan Ibu, kami akan baca, kemudian biar sama-sama terakomodasi, kami juga akan mengirimkan secara tertulis, maksimum tanggal 12 September, jadi dari kami dan dari Bapak juga mohon juga.

Mohon izin contohnya, anggaran untuk advokasi ketahanan keluarga enam belas koma tujuh miliar, jadi advokasi ketahanan keluarga, tadi *family resilience*.

Kemudian pengelolaan informasi edukasi tiga puluh delapan koma empat miliar, pembayar pemberdayaan alternatif sepuluh miliar, peran serta masyarakat lima puluh dua koma sembilan miliar, pelaksanaan paska rehabilitasi enam koma dua miliar, penguatan lembaga rehabilitasi milik pemerintah tiga belas koma delapan miliar, penguatan lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat, ini tadi terkait pertanyaannya Pak Arteria juga tiga sembilan koma satu miliar, pelaksanaan rehabilitasi oleh balai dan loka delapan belas koma satu miliar.

Kemudian anggaran intelijen lima puluh empat koma tiga miliar, pelaksanaan interdiksi empat belas koma dua miliar, pengawasan tahanan dan barang bukti lima belas koma tujuh miliar, penindakan pengejaran dua puluh satu koma lima miliar, penyidikan prekursor dan psikotropika enam koma dua miliar, penyidikan tindak pidana narkoba empat puluh delapan koma tiga miliar, penyidikan TPPU empat belas koma enam miliar.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua, Pak ketua, saya menyarankan yang seperti ini tidak usah dibacakan, jadi Pak Kepala ini menyampaikan saja.

KETUA RAPAT:

Beliau mau menyampaikan, jadi kita terima gitu loh, tenang aja, tenang Mas Arteri tenang, silakan Pak Petrus lanjut.

KEPALA BNN:

Kemudian kaitan dengan tadi pertanyaan juga dari Pak Nurdin yang adalah komandan kami Pak, jadi beliau tetap komandan, jadi tetap harus kami jawab kalau enggak, dari dulu kami masih letnan, beliau udah jenderal.

KETUA RAPAT:

Pak Petrus waktu kita tinggal, sudah lewat.

KEPALA BNN:

Ini juga saya mau sampaikan Pimpinan, berarti.

KETUA RAPAT:

Gini deh kesimpulan tadi saya sepakat, kita enggak perlu, Bapak tinggal kasih tanggal 12.

Coba kesimpulan sekali lagi, kesimpulan tadi, yang standar, yang tadi, yang tadi, tanggal 12 diserahkan paling lambat. Biar segera.

Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan dari Kepala Badan Narkotika Nasional atas pagu anggaran 2023 setelah Nota Keuangan Presiden Republik Indonesia sebesar satu koma delapan triliun lebih.

Bagaimana Pak Petrus, setuju ya. Bagaimana? Cocok ya.

(KETOK PALU 1X)

Dua, Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2023, untuk sinkronisasi di Badan Anggaran DPR RI, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Tapi di sini dengan catatan tanggal 12 Pak Petrus harus paling lambat, harus serahkan catatan *breakdown* itu, setuju ya.

F-P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Izin Pimpinan sebelum disetujui, berarti kalau memang ada catatan tanggal 12 menyampaikan, bagaimana kalau itu dituangkan saja dalam kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Terserah mau tuangkan juga enggak apa apa, yang penting kan.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Saya pikir gini loh, tadi kan kalau dilihat dari fakta hukum yang ada saat ini, sebenarnya rincian secara detail pun sudah disiapkan sama BNN, dan BNN pun sudah langsung menjawab dengan membacakannya secara lisan. Nah ini tinggal kebijakan kita, Pak BNN tinggal kasih aja hari ini, udah enggak usah pakai ini, poin duanya kita setuju Pak menurut saya.

F-P NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Maksud saya seperti itu kalau sudah.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Biar, biar lebih enak gitu.

KETUA RAPAT:

Ini kan terkait anggaran, jadi juga harus rapi. Jadi Pak Petrus tanggal 12 ya.

F-PDI PERJUANGAN (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua, sebentar Pak Ketua, hari ini udah selesai tidak ada... ya, ya, oke lah.

KETUA RAPAT:

Ter sabar Ter, ini bagus juga Pak, kelihatan dia sangat membantu BNN.

Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup rapat kita pada hari ini, saya tutup dengan ucapan *Alhamdulillah rabbil alamin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(KETOK PALU 3X)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18:00)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001